



Media: Merapi

Hari: Selasa

Tanggal: 03 Maret 2020

Halaman: 2

PEMBERIAN KERINGANAN DINILAI TAK SIGNIFIKAN Warga Minta Kenaikan PBB Ditinjau Ulang

UMBULHARJO (MERAPI) - Puluhan warga mendatangi DPRD Kota Yogyakarta mengawal rapat konsultasi terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2020. Sebagian warga menuntut kenaikan PBB ditinjau ulang karena dinilai memberatkan. Warga juga mempertanyakan, terkait perhitungan kenaikan PBB karena tidak semua nilai ketetapan PBB wajib pajak melonjak.

"Untuk permohonan keringanan PBB, kalau ternyata keringanan hanya diberikan Rp 10 ribu bagaimana? Masalahnya kenaikan PBB. Kenaikan PBB harus ditinjau ulang. Warga ingin kenaikannya dicabut," kata Hari, Ketua RT Kampung Sagan, Kelurahan Terban, usai rapat konsultasi di DPRD Kota Yogyakarta, Senin (2/3). Hal senada juga disampaikan Subur warga kawasan Malioboro.

Menurutnya kebijakan pengurangan PBB yang diberikan maksimal 75 persen tidak akan berarti. Alasannya kenaikan PBB ada yang mencapai hingga 300 persen.

Sedangkan Ayem warga Tegalarjo mempertanyakan dari 11 lembar SPPT PBB yang diterimanya, hanya 1 lembar yang tidak naik nilai ketetapan PBB tahun 2020.

Menanggapi hal itu Ketua DPRD Kota Yogyakarta Danang

Rudiatmoko yang menemui warga mengatakan, akan mencari jalan sebaik-baiknya. Dia menegaskan dewan tidak pernah diajak rembugan terkait kenaikan PBB karena kebijakan kenaikan NJOP PBB ditetapkan dalam perwal dan kepal yang menjadi kewenangan Pemkot Yogyakarta.

Dia menjelaskan hasil rapat konsultasi dengan walikota dan wakil walikota kemarin juga merekomendasikan terkait ketegasan zona nilai tanah dan peta bidang yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Itu karena zona nilai tanah dan peta bidang mempengaruhi penilaian PBB selain NJOP. Oleh sebab itu Komisi A akan mendampingi BPN Kota Yogya melakukan konsolidasi ke Kanwil BPN DIY terkait pe-



Puluhan warga menyampaikan aspirasi terkait kenaikan PBB tahun 2020 ke DPRD Kota Yogyakarta kemarin.

nilai tanah. Sedangkan Komisi B akan menelusuri regulasi terkait zona nilai tanah.

Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti dalam rapat konsultasi dengan DPRD setempat mengata-

kan, kenaikan NJOP PBB sebenarnya sebagai bentuk kepatuhan terhadap undang-undang. Kenaikan itu karena rekomendasi NJOP harus diperbarui setiap 3 tahun.

(Tri-o

Tindak Lanjut

☐ Untuk Ditinjau

☐ Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005